

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian.**

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan yang penting bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam sebuah negara adalah tujuan utama bagi pemerintah, karena dengan keadaan ekonomi yang baik maka kesejahteraan dari masyarakat akan terjamin. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran serta sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengaktifkan sektor riil atau ekonomi rakyat dengan cara memerlukan dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting.

Pada tahun 1980 terdapat pewacanaan bank syari'ah di Indonesia, namun selama masa 1980-an tersebut belum terealisasi. Baru pada tahun 1990 mulailah dibentuk bank syari'ah yang dimulai dari lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 18-20 agustus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokakarya itu kemudian dibawa ke musyawarah nasional (MUNAS) IV MUI yang diselenggarakan di Hotel Syahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Dari MUNAS tersebut dibentuklah tim pendirian bank syari'ah yang membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank

syari'ah pertama yang beroperasi di Indonesia pada tanggal 1 November 1991.<sup>1</sup>

Pada awal mulanya masyarakat dan pemerintah kurang tertarik dengan sistem bank syari'ah ini. Namun ketika bank-bank di Indonesia terliquidasi barulah masyarakat dan pemerintah mulai tertarik dengan sistem bank syari'ah, karena disaat bank-bank lainnya terliquidasi BMI menunjukkan keadaan uang yang stabil. Sejak saat itu banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional mulai membuka lembaga-lembaga sejenis yang berasaskan syari'ah.

Tujuan didirikannya BMI adalah untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam hal pengelolaan dana. Namun untuk mewujudkan tujuan BMI membantu kalangan bawah atau pengusaha kecil masih terhalang oleh prosedur yang ada pada perbankan. Usaha mikro yang dijalankan oleh pengusaha kecil bukan merupakan prosedur perbankan. Untuk mengatasi permasalahan ini maka didirikanlah lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk koperasi syariah yaitu Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

BMT dan BPRS merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional yaitu untuk lembaga yang membantu kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syari'ah. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini maka masyarakat kalangan

---

<sup>1</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal 10

kecil dan menengah dapat mengembangkan usahanya tanpa mengkhawatirkan akan kekurangan modal.

BMT berdiri berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, dalam sistem operasionalnya BMT tidak mengandung riba yang telah diharamkan hukumnya oleh agama Islam seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. AL-Imron: 130).

Perkembangan dari BMT dan BPRS dari tahun-ketahun semakin bertambah. Hal tersebut ditunjukkan oleh Data Statistik Perbankan Syariah terkait jaringan kantor perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hal 129

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal 39

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

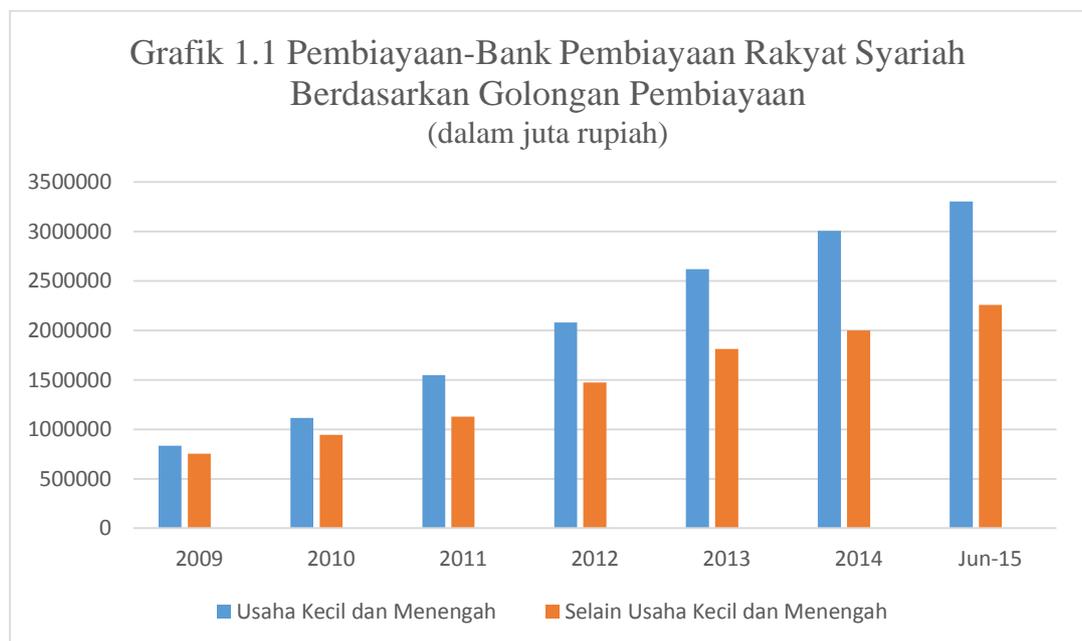
Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Juni 2015
<b>Bank Umum Syariah</b>							
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	287	262	336	517	590	320	327
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	161
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	433
<b>Total Kantor</b>	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber: Statistik Bank Syariah BI Juni 2015/www.bi.go.id

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah BPRS atau BMT mengalami kenaikan. Bila dibandingkan dengan Bank Umum Syariah kenaikan yang dialami BPRS atau BMT lebih baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat menengah ke bawah yang juga membutuhkan dana baik untuk modal kerja maupun konsumsi namun mereka mengalami kesulitan mendapatkannya di Bank Umum Syariah sehingga menjadi peluang bagi pengusaha yang mampu manajemen uang dengan baik untuk mendirikan BMT ataupun BPRS baru.

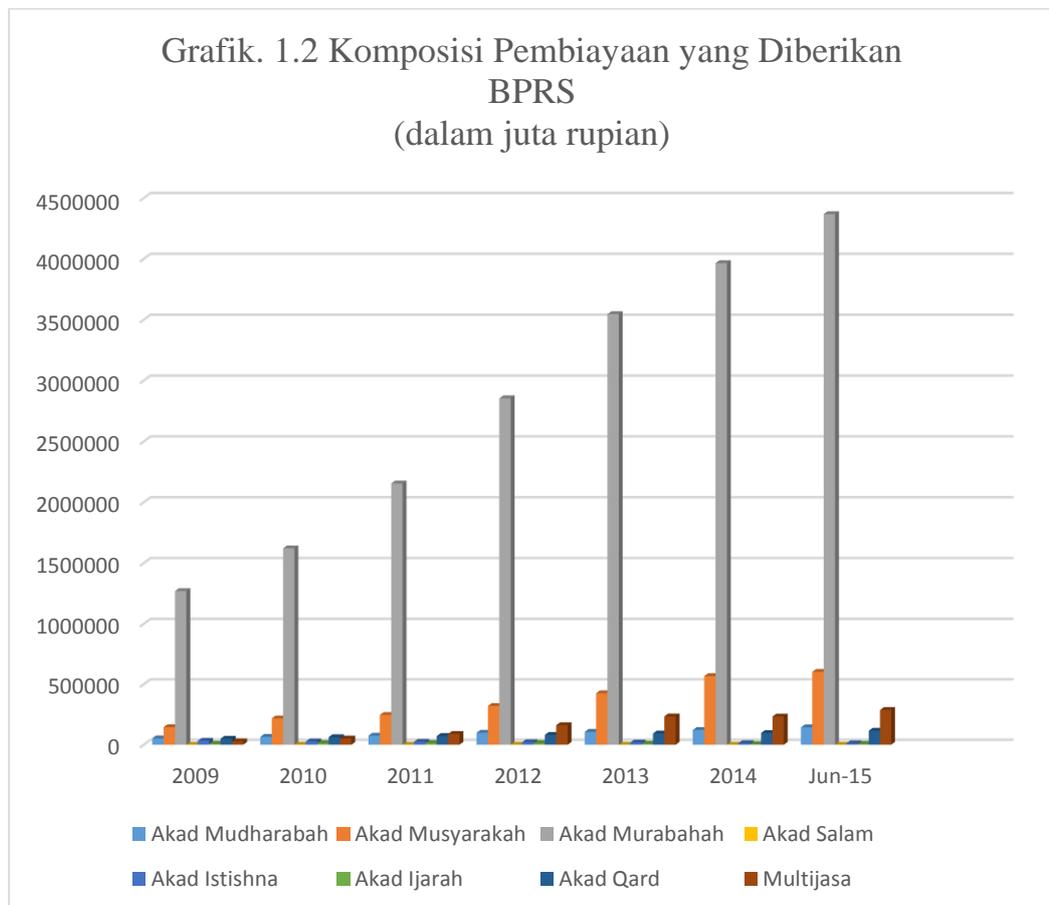
Seperti halnya perbankan syariah, BMT juga memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan BMT dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, sementara penyaluran dana dilakukan melalui pemberian pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha mikro maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Semakin banyak jumlah lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan dari tahun ketahun. Berikut data pembiayaan dari BPRS berdasarkan golongan pembiayaan yang tercatat di Bank Indonesia pada tahun 2009 sampai juni 2015:



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah BI Juni 2015/[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Jika dilihat dari total keseluruhan pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan yang dilakukan, setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari golongan pembiayaan usaha kecil menengah maupun pembiayaan selain usaha kecil menengah. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada jenis pembiayaan berdasarkan akad, yang tergambar pada grafik berikut ini:



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pembiayaan seperti pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah mengalami peningkatan disetiap tahunnya sehingga mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan di BPRS maupun BMT secara nasional. Meskipun terdapat penurunan pada pembiayaan lainnya, pertumbuhan pembiayaan di BPRS maupun di BMT secara nasional tidak terpengaruh. Hal tersebut dikarenakan minat anggota dari BPRS maupun BMT lebih besar terhadap pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Dalam lembaga keuangan syari'ah, “pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah.”<sup>4</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh lebih banyaknya tingkat pendapatan operasional yang diperoleh BPRS atau BMT dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh pendapatan-pendapatan dari sumber lain seperti seperti yang digambarkan oleh grafik berikut ini:



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah BI Juni 2015/www.bi.go.id

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa perolehan pendapatan terbesar adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari segala aktivitas operasional lembaga. Salah satu yang termasuk dalam pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan. Sedangkan pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas diluar usaha lembaga seperti

<sup>4</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 303

penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung milik lembaga dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah pendapatan operasional akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya.

Dalam operasionalnya, tidak selamanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT atau koperasi syariah tidak mengalami hambatan. Terkadang pembiayaan dapat mengalami masalah dan kegagalan pembiayaan yaitu pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah dan kegagalan tersebut biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal biasanya berasal dari diri nasabah atau anggota yang lalai atau dengan sengaja melanggar perjanjian, sedangkan faktor internal berasal dari dalam lembaga sendiri. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh ketidak maksimalan bank melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Maka untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan kegagalan pembiayaan, pihak lembaga haruslah melakukan pengawasan pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada setiap pembiayaan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal diperlukan untuk dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah ataupun kegagalan pembiayaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Papalangi bahwa untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam prosedur penyaluran diperlukannya sebuah sistem agar tujuan-tujuan dari prosedur pembiayaan

dapat tercapai.<sup>5</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun menyebutkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan merupakan salah satu lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menghindari pembiayaan bermasalah di masa mendatang.<sup>6</sup>

Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Nadia dan Darsono bahwa sistem pengendalian yang baik dapat menghasilkan pembiayaan yang baik pula. Sistem pengendalian internal yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur yang ada akan memudahkan bagi lembaga untuk dapat mengontrol pembiayaan yang dilakukan.<sup>7</sup> Seperti penelitian yang juga dilakukan oleh Raga dkk, bahwa Sistem pengendalian internal yang diterapkan sesuai dengan unsur-unsurnya akan memberikan dampak yang baik bagi pembiayaan yaitu terjadinya pembiayaan yang efektif dan terhindar dari masalah pembiayaan yang macet.<sup>8</sup>

Pada penelitian kali ini, objek penelitian yang dituju oleh penulis terdapat pada Baitul Maal Wat Tanwil Harapan Ummat (BMT Harum) dan Lembaga Koperasi Syari'ah Amanah Syari'ah Islam (LKS Asri). BMT

---

<sup>5</sup>Riska S. Papalangi, "Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit UKM pada PT.BRI (PERSERO) TBK Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Hal 1212-1220, (September, 2013), dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:36 WIB.

<sup>6</sup>Hesty Harun, "Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit Usaha pada BRI KCP Boulevard Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Hal. 294-303, (September, 2013), dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:42 WIB.

<sup>7</sup>Nadia Maya Sari dan Darsono, "Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1 No.1, (2012), dalam [http://eprints.undip.ac.id/35757/1/JURNAL\\_NADIA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35757/1/JURNAL_NADIA.pdf) diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:33 WIB

<sup>8</sup>Raga Fahmy Darmawan, et. All., "Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)", *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Progam S1*, Vol.3 No.1, (2015), dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1akarticleviewFile48053632> diakses pada tanggal 08 Maret 2016 pukul 13:39 WIB

Harum beralamatkan di Jl. Letjend Soeprapto No. 24 Tulungagung. BMT Harum Tulungagung berdiri sejak tahun 1996 yang dirintis oleh 30 orang pendiri dengan modal Rp. 3.500.000,- dan sampai sekarang masih beroperasi dengan baik. Berikut adalah jumlah anggota yang terdapat di BMT Harum pada tahun 2015:

Tabel 1.2 Rincian Rekening BMT Harum Tahun 2015

<b>Keterangan</b>	<b>Banyak Rekening</b>
Tabungan	
- Simpanan Mudharabah	1240
- Simpanan Haji	14
- Simpanan Qurban	9
- Simpanan Pendidikan	64
- Simpanan Investasi	20
- Simpanan Wadi'ah	13
<b>Sub Total</b>	<b>1.360</b>
Deposito	
- Deposito 1 Bulan	10
- Deposito 3 Bulan	38
- Deposito 6 Bulan	43
- Deposito 12 Bulan	140
<b>Sub Total</b>	<b>231</b>
Pembiayaan	
- Mudharabah	5
- Murabahah	16.087
- Musyarakah	50
<b>Sub Total</b>	<b>16.142</b>

Sumber: Dokumen BMT Harum.

Sedangkan Lembaga Koperasi Syari'ah Asri beralamatkan di Jl. Mayor Sujadi Timur No. 45 Plosokandang Tulungagung. Lembaga Koperasi Syari'ah ini telah berdiri sejak tahun 2009 yang di prakarsai oleh Drs. Mubadi yang sekarang menjabat sebagai pemimpin di LKS Asri. Pada saat ini lembaga keuangan ini telah memiliki satu kantor pusat dan 3 kantor cabang yang berada di Sendang, Kauman dan Kalidawer. Seluruh anggota yang

bergabung di KS Asri berkisar antara 1.050 orang dan keseluruhan anggota menggunakan pembiayaan murabahah.

Dari pemikiran dan permasalahan yang telah diutarakan tersebut, maka penulis memberi judul penelitian pada skripsi ini adalah “**Sistem Pengendalian Internal dan Implementasinya terhadap Persetujuan Pembiayaan Murabahah (Studi Multi Situs Pada LKS Asri Tulungagung Dan BTM Harum Tulungagung)**”.

#### **B. Fokus Penelitian.**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam persetujuan pembiayaan murabahah di BMT Harum dan LKS Asri?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Harum dan LKS Asri?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di BMT Harum dan LKS Asri?
4. Bagaimana persamaan dan perbedaan implementasi pengendalian internal antara BMT Harum dan LKS Asri?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam persetujuan pembiayaan murabahah.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal
3. Untuk menjelaskan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal di lembaga.
4. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan implementasi pengendalian internal antara BMT Harum dan LKS Asri.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah serta menambah wawasan terkait permasalahan-permasalahan dalam sistem pengendalian internal. Sehingga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran-pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Koperasi Syariah (LKS) Asri Tulungagung dan BMT Harum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi dalam penerapan sistem pengendalian internal. Sehingga kualitas pembiayaan semakin meningkat lagi.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan bagi pengambil kebijakan pada kedua lembaga tersebut dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penerapan sistem pengendalian internal.

c. Bagi Peneliti yang Akan Datang.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang penerapan sistem pengendalian internal pada persetujuan pembiayaan murabahah.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan sumber ilmu pengetahuan serta gambaran proses yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah terkait penerapan sistem pengendalian internal.

**E. Penegasan Istilah.**

Supaya para pembaca mampu memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam judul skripsi beserta hal-hal

yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan istilah-istilah yang akan menjadi kata kunci dari judul. Adapun kata kuncinya sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Internal dan Implementasinya Terhadap Persetujuan Pembiayaan” adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah tujuan yang dicapai dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya.<sup>9</sup>
- b. Pengendalian Internal adalah suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektifitas dan efisiensi operasi.<sup>10</sup>
- c. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>11</sup>
- d. Pembiayaan Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 139

<sup>10</sup> Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 180.

<sup>11</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal

## 2. Penegasan Operasional

- a. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang disusun dengan tujuan untuk dapat mengkoordinasi upaya-upaya untuk menjaga keamanan harta, memajukan keefektifan sistem operasional dan menjaga dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sistem ini penting dilakukan sebagai upaya dari lembaga untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dapat merugikan pilah lembaga.
- b. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dengan akad jual beli dimana lembaga menjual dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan suatu aset tersebut kepada pembeli.

### **F. Sistematika Pembahasan.**

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari berbagai sub bab, sub bab tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi acuan dalam awal proses penelitian, di dalamnya diuraikan keterkaitan antara latar belakang berupa besarnya minat anggota atau nasabah melakukan pembiayaan dengan pengendalian internal guna menjaga manajemen lembaga agar tetap berjalan baik. Bab ini nantinya terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka sebagai dasar asumsi yang digunakan serta arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam penelitian ini diuraikan sebuah kerangka teori, beberapa teori yang terkait dengan pokok masalah penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang uraian deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data tentang sistem pengendalian internal pada persetujuan pembiayaan murabahah yang diterapkan di LKS Asri Tlungagung dan BMT Harum Tlungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V berisi pembahasan tentang sistem pengendalian internal pada persetujuan pembiayaan murabahah yang diterapkan di LKS Asri Tlungagung dan BMT Harum Tlungagung.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan saran-saran dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.